

## Model Penguatan Modal Sosial Pembangunan Budaya Dan Kearifan Lokal Suku Sakai Kabupaten Bengkalis

Trio Saputra<sup>1</sup> , Aguswan<sup>1</sup> , Syofian<sup>2</sup>  Harapan Tua F.S<sup>2\*</sup> 

<sup>1</sup> Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Lancang Kuning, Provinsi Riau, Indonesia

<sup>2</sup> Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Provinsi Riau, Indonesia

\* Korespondensi: harapantua@lecturer.unri.ac.id ; Tel: (sertakan kode negara) +62-0853-6446-5335

Diterima: 21 April 2020; Disetujui: 19 Januari 2021; Diterbitkan: 25 April 2021

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah : (1) Identifikasi kelompok warga Sakai Ingin memperoleh (2) Peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan budaya dan kearifan lokal,(3) Model penguatan modal sosial yang sesuai untuk Suku Sakai mendeskriptifkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengungkapkan fenomenologi, mengeksplorasi dan mendeskriptifkan kondisi warga Sakai saat ini. Informan penelitian yaitu Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Bengkalis, Camat Tualang Mandau, Camat Mandau , Camat Bathin Salopan Kepala Desa dan ketua Bathin (kepala suku) di tiga kawasan Sakai yaitu kawasan hutan Tanaman Industri, Kawasan sungai Rokan Muandau, dan kawasan adat bathin salopan.penelitian ini dilakukan pada tahun juli 2018 sampai dengan april 2019. Hasil penelitian ini adalah (1) identifikasi menemukan kelompok warga sakai terbagi empat kelompok yang berada dalam wilayah yang berbeda. (2) Peran pemerintah dianggap belum maksimal dalam pembangunan dan pemberdayaan warga sakai di kabupaten bengkalis (3) Model penguatan modal social pada Pemerintah, swasta dan masyarakat harus saling memperkuat serta mendukung dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat suku sakai.

**Kata kunci:** Modal Sosial, Suku Sakai, Pembangunan

**Abstract:** *The objectives of this research are: (1) Identification of groups of Sakai residents who want to obtain (2) The role of local government in cultural development and local wisdom, (3) The appropriate model for strengthening social capital for the Sakai tribe. This study uses a qualitative approach by expressing phenomenology, exploring and describing the current condition of the Sakai people. The research informants were the Head of the Bengkalis Regency Tourism and Culture Office, Tualang Mandau Sub-District Head, Mandau Sub-District Head, Village Head Bathin Salopan District and the Head of Bathin (tribal chief) in three Sakai areas, namely the Industrial Plantation Forest area, the Rokan Muandau River Area, and the Batin Salopan Traditional Area. This research was conducted in July 2018 to April 2019. The results of this study are (1) identification of finding groups of Sakai residents divided into four groups who are in different areas. (2) The role of the government is considered to have not been maximal in the development and empowerment of the Sakai people in the Bengkalis district (3) The social capital strengthening model in the Government, the private sector and the community must mutually strengthen and support the development and empowerment of the Sakai tribe.*

**Keywords:** *Social Capital, Sakai Tribe, Development*

## 1. Pendahuluan

Pembangunan budaya dan kearifan lokal masyarakat suku terasing di Indonesia merupakan perwujudan dalam memperkuat nilai-nilai sosial dan keberagaman yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar memiliki keberagaman dan kebinekaan etnis dan struktur sosial yang berbeda-beda merupakan sebuah upaya bersama untuk menyatukan rakyatnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memperkuat dan menyatukan keberagaman tersebut maka diperlukan model atau kebijakan pembangunan sosial yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat lokal serta Komunitas Adat Terpencil merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia yang perlu diberdayakan, agar dapat hidup sejahtera lahir dan bathin (Irmawan, 2018).

Pentingnya dilaksanakan kajian pada masyarakat Sakai adalah untuk melihat sejauh mana keberadaan dan keberagaman masyarakat suku Sakai saat ini pada tahun 2019 dan selanjutnya dapat memberikan masukan dalam pembuatan kebijakan pembangunan budaya dan kearifan lokal Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Suku Sakai merupakan salah satu suku asli di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, dan sampai saat ini suku Sakai masih disebut sebagai suku terasing dan Keterbelakangan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Penyebaran penduduk Warga Sakai pada awalnya dominan bertempat tinggal di kecamatan Muandau Kabupaten Bengkalis. Dalam perkembangannya Kecamatan Mandau di mekarkan menjadi empat kecamatan terdiri dari Kecamatan Mandau dengan Ibu kota Duri, serta Kecamatan pinggir, Kecamatan Tualang Mandau, dan Kecamatan Bathin Solopan. Penyebaran dan pengelompokan Warga suku Sakai mengelompokkan dengan kepemimpinan yang mempengaruhi pemimpin adat suku sakai atau bathin beberapa versi yang menjelaskan tentang bathin sebagai suatu kelompok suku, bathin sebagai kawasan budaya, dan bathin sebagai gelar adat atau jabatan menurut adat oleh seseorang yang menjabat sebagai kepala suku (Asril, A., Jamarun, N., Hamzah, H., Halilintar, M., & Saputra, 2020) Pada saat ini populasi dan penyebaran penduduk suku Sakai dominan berada pada Kecamatan Bathin Solopan dan sebagian kecil tersebar di Kecamatan lainnya Kabupaten Bengkalis.

Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2019 Kabupaten Bengkalis memiliki 11 kecamatan dan 136 desa serta 19 kelurahan yang dikelompokkan atas dua wilayah geografis yaitu daerah kepulauan dan daratan. Wilayah bagian daratan terdiri dari Kecamatan Talang Mandau, Pinggir, Mandau dan Bathin Solopan. Sementara wilayah bagian kepulauan (lautan) terdiri dari Bandar Laksamana, Rupert Utara, Bukit Batu, Rupert, Siak Kecil, Bantan dan Bengkalis. Antara dua wilayah daratan dan lautan yang ada di Kabupaten Bengkalis, maka terdapat dua suku asli di Kabupaten Bengkalis yang kehidupannya dikategorikan masih Tertinggal. Suku tersebut yaitu : (1) suku Sakai tersebar di bagian daratan dan (2) suku Akit berada dibagian lautan. Ke dua suku asli tersebut memiliki peran penting dalam peradaban sejarah budaya di Kabupaten Bengkalis.

Kebiasaan Warga Suku Sakai yang dahulunya menganut pola hidup berpindah-pindah (Nomaden) dari hutan yang satu ke hutan yang lain, namun pada saat ini tidak diperoleh lagi. Hal ini di sebabkan hutan sebagai habitat tempat tinggal mereka di kuasai oleh perusahaan Industri Kelapa sawit dan pembangunan kilang Minyak Caltex atau Chevron dan migrasi warga pendatang yang membuka lahan perkebunan dan tempat tinggal khususnya di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Suku Sakai masih digolongkan sebagai masyarakat tertinggal atau terasing, miskin secara kultural maupun fungsional. Komunitas adat terpencil ada juga diantaranya membuat program pembangunan pada suatu masyarakat tradisional (Kurtubi, D, 2017). Disayangkan upaya tadi banyak gagal karena masih rendahnya partisipasi masyarakat yang bersangkutan. Kini di sadari itu akibat pembangunan yang ditawarkan tidak dimulai dari jejaring akar budaya KAT itu sendiri yaitu kearifan lokal (Tumanggor, 2017).

Modal sosial sebagai solusi dalam upaya memperkuat pelaksanaan kebijakan pada suku Sakai, Oleh karena itu suku Sakai memerlukan dukungan dan bantuan dari semua pemerintah sebagai pelaku kebijakan, khususnya dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Suku Sakai merupakan suku asli Kabupaten Bengkalis yang hidup sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi akar budaya daerah dan nasional yang harus dilestarikan dan dikembangkan, namun pengembangan dan

*Trio Saputra, Aguswan, Syofian, Harapan Tua F.S*

*Model Penguatan Modal Sosial Pembangunan Budaya Dan Kearifan Lokal Suku Sakai Kabupaten Bengkalis*

pelestarian suku Sakai tidak berkembang dengan baik. Seperti kurangnya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, perbaikan ekonomi, pengutan sosial budaya serta pembangunan infrastruktur masih dirasakan sangat kurang. Sehingga masih banyak warga Sakai tidak memiliki pendidikan yang memadai, tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki tempat tinggal yang layak di huni sehingga warga Sakai pada saat ini masih kategorikan sebagai masyarakat miskin dan keterbelakangan di Kabupaten Bengkalis.

Pembangunan sosial perlu diwujudkan dalam bentuk Modal sosial yang meliputi norma-norma, kepercayaan, kohensivitas, altruisme dan jaringan sosial yang saling berhubungan. Agar masyarakat Sakai mendukung proses pencapaian suatu tujuan dalam menyelesaikan permasalahan dengan melaksanakan kegiatan berbagai aspek kehidupan (Putnam, 1993).

Jaringan sosial memungkinkan adanya koordinasi dan komunikasi yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya di antara sesama anggota masyarakat. Serta kepercayaan (*trust*) memiliki dampak positif dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dibuktikan dengan suatu kenyataan bagaimana keterkaitan orang-orang yang memiliki rasa saling percaya (*mutual trust*) dalam suatu jaringan sosial memperkuat norma-norma mengenai keharusan untuk saling membantu. kemudian berbagai keberhasilan yang dicapai melalui kerjasama pada waktu sebelumnya dalam jaringan ini akan mendorong bagi keberlangsungan kerjasama pada waktu selanjutnya. Lebih jauh modal sosial bahkan dapat menjembatani jurang pemisah antara kelompok-kelompok yang berbeda ideologi dan memperkuat kesepakatan tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat.

Penelitian sebelumnya disajikan dalam penelitian ini untuk dapat membandingkan konsep yang digunakan dan pendekatan-pendekatan pada penelitian terdahulu (Asy'ari, 2009) *Implementasi Coporate Social Responsibility* sebagai modal sosial, hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi *Coporate Social Responsibility* mendapat kendala dikarenakan ketidakpercayaan karena persepsi masyarakat terhadap perusahaan dan pemerintah daerah, oleh karena itu modal sosial perlu diterapkan agar program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan melihat permasalahan budaya di lingkungan kondisi ekonomi terpinggirkan.

(Pontoh, 2010) Penelitiannya dilaksanakan berdasarkan metode eksploratif dan deskriptif, dimana upaya dilakukan untuk menampilkan gambaran pola kehidupan sosial ekonomi masyarakat, norma, kepercayaan lokal, sistem produksi dan reproduksi serta politik lokal diketahui bahwa masyarakat nelayan di Desa Gangga Dua, Kabupaten Minahasa Utara masih merupakan masyarakat dengan karakter modal sosial terikat (*Social Capital Bonding*). Tipologi modal sosial ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma dari aspek ekonomi yang dimiliki dan dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini berdampak pada struktur sosial yang terbentuk dalam kehidupan ekonomi masyarakat

Kemudian (Pranadji, 2016) penguatan modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Hipotesa penelitian adalah bahwa pemberdayaan masyarakat pedesaan tidak akan berhasil jika tidak dilandaskan pada penguatan modal sosial setempat. Elemen modal sosial yang dinilai penting adalah tata nilai, kompetensi SDM, manajemen sosial, keroganisarian masyarakat, struktur sosial, kepemimpinan, dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Desa yang memiliki modal sosial relatif baik cenderung memiliki kemampuan lebih baik dalam mengatasi permasalahan. Model pemberdayaan masyarakat pedesaan di nilai efektif adalah yang dilandaskan pada penguatan modal sosial setempat. Penguatan tata nilai kemajuan merupakan inti dari penguatan modal sosial, dan akan efektif jika dimulai dari penguatan kepemimpinan masyarakat setempat, manajemen sosial, dan keorganisasian masyarakat.

(Meilani, N. L., Wicaksono, B., Lilestina, S., & Subeqi, 2019) secara kualitatif juga teridentifikasi bahwa bukan tentang hubungan kekeluargaan ataupun ada atau tidak anggaran yang menentukan keaktifan Kampung KB, melainkan kesadaran kolektif (*Collective Consciousness*) yang sesungguhnya di perkotaan maupun pedesaan. Namun sayangnya, sampai dengan sekarang ini belum terbangun proses institusionalisme terhadap *Collective Consciousness* tersebut.

Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat perbandingan kajian modal sosial di diantaranya adalah kondisi objek penelitian merupakan suku pedalaman yaitu suku Sakai, pendekatan di

penelitian ini berwujud norma-norma, kepercayaan, kerjasama, informasi dan jaringan keterkaitan merupakan prakondisi bagi perkembangan ekonomi. Selain itu juga merupakan terciptanya penguatan modal sosial dan efektif dalam penerapan pembangunan berbasis kearifan lokal

Kajian penelitian ini untuk mengidentifikasi kelompok warga sakai yang berada di kecamatan Talang Muandau, Kecamatan Muandau dan kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dan Peran pemerintah daerah kabupaten bengkalis dalam memperkuat pembangunan budaya dan kearifan lokal serta menemukan Model Penguatan Modal sosial Pembangunan Budaya dan kearifan Lokal Kabupaten Bengkalis.

## 2. Metode

Pendekatan Penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu pengumpulan, pengolahan dan interpretasi data sebagai upaya untuk mengungkapkan kebenaran yang terdapat dalam masalah penelitian. Jenis, teknik pengumpulan dan pengolahan data yang di kumpulkan adalah data sekunder dan primer yang didapatkan melalui pengamatan lapangan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis terhadap fakta dilangsungkan secara kualitatif dengan model spradley. Subyek penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada tiga kawasan yang ditempati warga Sakai yaitu Kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Arara Abadi Desa Beringin kecamatan Tualang Mandau, Desa Sei banga Kecamatan Mandau dan Desa Petani (kawasan tepian sungai rokan) , Desa Kesumbu ampay (Desa Adat) Kecamatan Bathin salopan Kabupaten Bengkalis. informen penelitian ini adalah

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bengkalis, Camat Mandau Kabupaten Bengkalis, Camat Talang Muandau Kabupaten Bengkalis, Camat Bathin salopan Kabupaten Bengkalis, Kepala desa sei banga kecamatan Mandau, Kepala Desa Beringin kecamatan Talang Muandau, Kepala Desa Petani dan Kesumbu ampai kecamatan bathin salopan, Tokoh adat masyarakat Sakai pada masing-masing Desa di 3 kecamatan Kabupaten bengkalis. Waktu Penelitian Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis mulai pada bulan juli 2018 sampai dengan bulan april 2019.

## 3. Hasil

Penelitian ini menghasilkan Model Kebijakan penguatan modal sosial pembangunan budaya dan kearifan lokal dengan melakukan Identifikasi keberadaan Suku Sakai yang tersebar di Kecamatan Talang Muandau, Kecamatan Muandau dan kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Serta peran pemerintah daerah dan *stakeholder* dalam memperkuat pembangunan budaya untuk masyarakat suku Sakai. Dari kajian ini diharapkan dapat menghasilkan model kebijakan yang dapat memberikan masukan bagi Pemerintahan Daerah dan meningkatnya pembangunan Budaya untuk masyarakat suku Sakai di Kabupaten Bengkalis. Implementasi penguatan modal sosial dipahami dalam tiga tipologinya yaitu modal sosial sebagai perekat warga komunitas, sebagai penyambung atau penghubung dan sebagai koneksi atau akses. Modal sosial sebagai modal dasar bagi komunitas dapat mengefektifkan modal dan potensi lainnya, namun elemen yang melekat tersebut memberi manfaat dan dapat diakes oleh semua warga komunitas serta tidak bertentangan dengan standar nilai yang berlaku secara universal (Abdullah, 2016). Secara Penelusuran dengan melakukan observasi pada masyarakat Sakai Kabupaten Bengkalis dilakukan dengan telaah kajian penelitian sebagai berikut :

### 3.1. Identifikasi Kelompok suku Sakai Kabupaten Bengkalis.

Dilihat dari perkembangan sejarah bahwa dahulunya mayoritas penduduk Muandau Kabupaten bengkalis adalah warga asli Suku Sakai atau warga suku hutan pedalaman yang tersisih (terisolir) dari masyarakat umum. kebiasaan masyarakat atau warga suku Sakai lebih suka tinggal di hutan dengan pola hidup berpindah-pindah dari hutan yang satu ke hutan yang lain dan bergantung pada alam. Pada saat sekarang ini masyarakat atau warga suku Sakai tidak lagi membiasakan diri untuk berpindah-pindah dari hutan yang satu ke hutan lain, disebabkan hutan sebagai tempat tinggal mereka telah habis dan di kuasai oleh Perusahaan Perambah hutan (HTI) yang telah memperoleh ijin dari

*Trio Saputra, Aguswan, Syofian, Harapan Tua F.S*

*Model Penguatan Modal Sosial Pembangunan Budaya Dan Kearifan Lokal Suku Sakai Kabupaten Bengkalis*

Pemerintah untuk mengkonversi hutan alam menjadi Hutan Tanaman Industri serta pembangunan kilang minyak oleh perusahaan Caltex atau Cevron. Wilayah masyarakat Sakai meliputi minas, belutu, tingaran, sinangan, semunai, panaso dan baruban hingga dumai (Suparlan, 1995) Hutan ulayat yang berada diatas hak ulayat masyarakat Sakai banyak telah berpindah kepada penduduk pendatang dengan menjual lahan ataupun barter dengan barang yang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hutan-hutan tersebut yang telah habis di kuasai oleh perusahaan HTI maupun penduduk pendatang menyebabkan warga suku Sakai tidak lagi memiliki lahan perkebunan maupun lahan tempat tinggal serta pola kehidupan mereka berkelompok dan terpecah antara desa yang satu dengan desa lainnya.

Hasil penelusuran dan melihat keberadaan Suku Sakai di Desa Koto Pait Kecamatan Tualang Muandau terdapat sekelompok kepala keluarga Sakai yang masih tertinggal dan berada pada kemiskinan dan kebodohan disebabkan tidak memiliki akses dalam mengikuti pendidikan. Kajian (Ningsih, D., & Jalil, 2017) Pentingnya Pendidikan merupakan salah satu bidang yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat Sakai. tidak memiliki lahan pertanian maupun tempat tinggal menjadi masyarakat Suku Sakai Desa Koto Pait menumpang di atas lahan milik orang lain dengan membangun rumah tempat tinggal seadanya yang tidak layak untuk ditempati, Rumah tempat tinggal suku Sakai yang di bangun seadanya dengan kondisi yang tidak bersih dan sehat sehingga anak – anak mereka banyak menderita gizi buruk dikarenakan tidak mendapatkan asupan makanan yang bersih dan sehat. Akses fasilitas kesehatan jauh dari kelompok warga sakai dan saat ini pemerintah desa maupun bidan desa tidak ada melakukan penyuluhan kesehatan pada warga sakai.

Kehidupan warga Sakai yang tinggal di dalam Hutan Tanaman Industri (HTI) PT.Arara Abadi dengan kondisi rumah mereka yang tidak layak di huni. Dan hal ini memerlukan bantuan dari Pemerintah Daerah. Untuk membangun rumah layak huni untuk warga Sakai tersebut. Penduduk Sakai yang masih menetap di daerah pedalaman hutan tepatnya dikawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) karena masih memanfaatkan hutan sebagai sumber dalam pencarian makan serta tempat tinggal yang dibuat dari kayu dan atap seadanya mereka menganggap daerah tersebut sebagai tanah kelahirannya. Sementara tanah atau kampung warga Sakai tersebut telah di jual dari bentuk kepemilikan surat tanah yang dibuat oleh pemerintah desa kepada penduduk pendatang dan pembukaan lahan hutan dari perusahaan Hutan Tanaman Industri PT.Arara Abadi. Jumlah penduduk Sakai di kawasan hutan pedalam HTI sebanyak dua puluh dua (22) Kepala Keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak enam puluh (60) jiwa berada di dusun suluk bongkal kecamatan talang Muandau Kabupaten Bengkalis.

Warga Sakai juga hidup berkelompok pada kawasan perairan sungai rokan seperti di sekelompok Sakai yang ada di jembatan dua sungai rokan Desa petani kecamatan Bathin solopan, yang kehidupan keseharian mereka bergantung pada sungai untuk mencari ikan. Hasil tangkapan mereka gunakan sebagai kebutuhan mereka sehari-hari dan kadang kala ada juga jual kepada pedagang ikan. Penelitian (Hidayat, 2011) Penyebaran penduduk suku Sakai juga berada pada kawasan hutan rakyat (Adat) kesumbo ampai yang masih alami terjaga dengan baik oleh masyarakat Sakai Kecamatan Bengkalis. Desa kesumbo ampai sampai saat ini telah menjaga dan melestarikan adat istiadat yang berlaku. Nilai-nilai, norma dan kepercayaan di anut dan dijaga oleh warga. Kekuatan kelembagaan adat dan peran kepala suku (bathin) sangat menentukan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Salah satu upaya yang telah diupayakan oleh masyarakat desa kesumbo ampai adalah menjaga dan melestarikan hutan yang di anggap masyarakat sebagai tempat untuk mencari ramuan alami untuk pengobatan masyarakat yang menderita sakit. Begitu juga dengan lembaga adat sebagai pusat kegiatan persukuan telah dibangun oleh masyarakat dengan artistik modern klasik yang menggambarkan pola kehidupan warga suku Sakai.

Kemudian yang sangat menarik dalam sistem dan kelembagaan adat di desa kesumbo ampai bahwa kepemilikan hutan dan lahan pertanian di desa ini dikuasi oleh lembaga kerapatan adat. Lembaga kerapatan adat menetapkan aturan kepada warga Sakai tentang aturan kepemilikan lahan yang hanya di khususkan untuk warga Sakai. Warga Sakai tidak dibolehkan menjual lahan tanah milik mereka kepada warga suku lain, kecuali hanya untuk warga Sakai semata-mata yang dapat diperjual

*Trio Saputra, Aguswan1, Syofian, Harapan Tua F.S*

*Model Penguatan Modal Sosial Pembangunan Budaya Dan Kearifan Lokal Suku Sakai Kabupaten Bengkalis*

belikan dengan pengesahan surat tanah dikeluarkan atau disyahkan oleh lembaga kerapatan adat desa kesumbo ampai Kecamatan Bathin Solopan Kabupaten Bengkalis. Pengelompokan warga Sakai Kabupaten Bengkalis dibagi atas 4 yaitu :

- a. Kelompok warga Sakai yang bertahan hidup di pedalaman hutan khususnya pada area Hutan Tanaman Industri (HTI) yang mereka masih bertahan di areal tersebut karena ingin bertahan dikampung mereka, tetapi kampung yang dimaksud telah dikuasai oleh masyarakat pendatang dan pembukaan lahan Hutan Tanaman Industri (HTI). Seperti di desa koto pait kecamatan tualang Mandau Kabupaten Bengkalis.
- b. Kelompok warga Sakai yang berada di diperairan sungai Rokan yang menggantungkan kehidupan pada sungai untuk mencari ikan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup, seperti di jembatan II desa petani kecamatan bathin salopan.
- c. Kelompok warga Sakai yang telah berbaur dengan masyarakat umum yang telah beradaptasi, sehingga mereka memperoleh kehidupan yang modernisasi berada di ibu koto kecamatan Mandau (kota Duri).
- d. Kelompok warga Sakai yang telah menganut pola budaya dan kearifan lokal yang baik dengan mempertahankan lingkungan hidup (hutan) dan mempertahankan akar budaya mereka sehingga tidak mengalami kepunahan. Seperti sekelompok warga suku Sakai yang berada desa kesumbo ampai di kecamatan bathin Solopan Kabupaten Bengkalis.

### **3.1 Peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam pembangunan warga Sakai Kabupaten Bengkalis.**

Adapun peran pemerintah daerah dalam pembangunan Sakai Kabupaten Bengkalis untuk dapat di laksanakan yaitu :

- a. Pendataan kependudukan warga Sakai dengan mempermudah warga Sakai untuk mendapatkan identitas kependudukan secara pasti.
- b. Penyediaan lahan pertanian dan perkebunan/ pembukaan lahan baru yang dikuasai Negara untuk diserahkan kepada warga Sakai Bengkalis
- c. Pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat Sakai dengan status kepemilikan lahan perumahan yang legal atas kepemilikan mereka sendiri.
- d. Pembangunan sarana pendidikan dasar untuk anak-anak Sakai pada wilayah yang mereka tempati, karena hampir 75 % anak-anak Sakai tidak mengecap pendidikan.
- e. Penyediaan tenaga medis dan medis untuk pendampingan kesehatan masyarakat.
- f. Penguatan kelembagaan adat dan budaya Sakai yang hampir mendekati kepunahan.

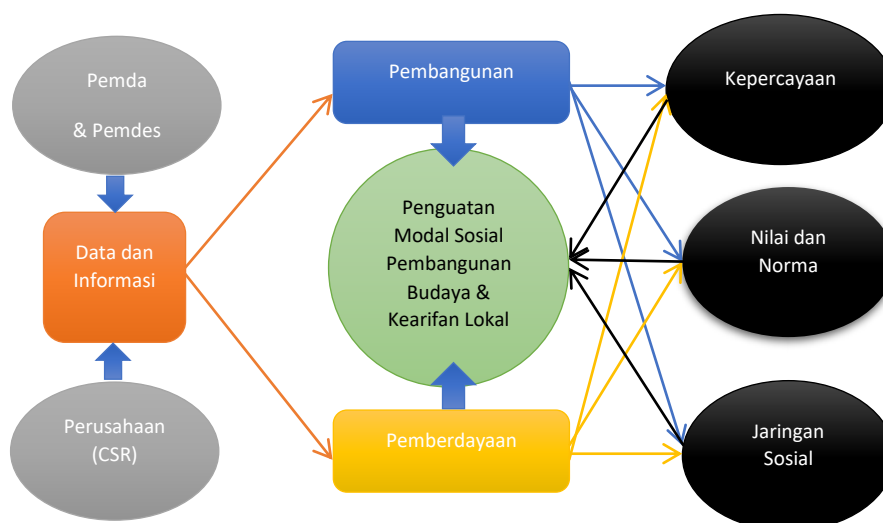
Pembangunan dan pemberdayaan pada masyarakat Sakai tentunya memerlukan sumber daya yang memadai dan adanya kemauan pengambil kebijakan untuk turut serta peduli dengan kondisi warga saat ini. Untuk itu Pemerintah, swasta dan masyarakat harus saling memperkuat serta mendukung *Corporate Social Responsibility* berupaya meningkatkan kualitas kehidupan serta menekankan pada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui program-program CSR. Program CSR yang membentuk pola hubungan sosial (Tan, 2020.) agar kehidupan warga Sakai tidak lagi disebut sebagai masyarakat suku terasing di negeri ini.

### **3.2. Model Penguatan Modal sosial Pembangunan Budaya dan kearifan lokal Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.**

Modal sosial merupakan suatu konsep dengan berbagai definisi yang saling terkait yang di dasarkan pada nilai jaringan sosial. Serta bagian-bagian dari organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan-tindakan terkoordinasi. Modal sosial sebagai kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum didalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat tersebut. Berdasarkan Studi literatur dan berbagai definisi modal sosial dan di kaitkan maka dapat di hasilkan bentuk model penguatan modal sosial pembangunan budaya suku Sakai dan kearifan lokal Kabupaten Bengkalis yang dapat dihasilkan dalam sebuah model berikut :

*Trio Saputra, Aguswan, Syofian, Harapan Tua F.S*

*Model Penguatan Modal Sosial Pembangunan Budaya Dan Kearifan Lokal Suku Sakai Kabupaten Bengkalis*



**Gambar 1:** Model Penguatan Modal sosial Pembangunan Budaya dan Kearifan Lokal suku Sakai Kabupaten bengkalis

Keterangan gambar:

- Pemerintah Daerah dan desa beserta pelaku usaha (perusahaan) memerlukan data dan informasi tentang keberadaan suku Sakai Kabupaten bengkalis berisikan : data dan informasi tentang kependudukan, sosial, ekonomi, pendidikan, rumah tempat tinggal dan aset kepemilikan.
- Data dan informasi yang telah diperoleh secara lengkap dan akurat digunakan untuk melaksanakan Program/ kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat suku Sakai Kabupaten bengkalis.
- Pembangunan dan pemberdayaan perlu memperhatikan aspek-aspek nilai dan norma, kepercayaan dan jaringan sosial yang berlaku pada masyarakat Sakai.

#### 4. Pembahasan

Hasil dari Model penguatan modal sosial yang di tujuan untuk pembangunan Budaya dan kearifan lokal bagi warga Sakai memerlukan pemahaman terhadap kaidah-kaidah berikut :

##### 4.1. Pemahaman komponen-komponen modal sosial suku Sakai Kabupaten Bengkulu.

Modal sosial yang perlu diperhatikan adalah kepercayaan, nilai dan norma serta jaringan sosial yang telah terjadi dan terbentuk pada kelompok suku Sakai. Bentuk kepercayaan yang secara turun temurun yang diyakini warga Sakai adalah percaya kepada roh dari leluhur yang telah mati. Meminta kepada roh dijadikan alat penghubung orang Sakai untuk meminta bantuan, apabila sala satu warga Sakai mendapatkan musibah dari makhluk-makhluk halus. Menurut keterangan ketua bathin/ kepala suku Sakai bahwa yang bisa memanggil roh yang telah mati adalah para keluarga Sakai yang memiliki ilmu ghaib (Dukun) Sakai. Begitu juga norma dan nilai-nilai yang telah terbangun, bagi warga Sakai meyakini adanya pantangan dan larangan untuk warga Sakai yang harus di taati seperti ketika berumah tangga, memasuki hutan untuk berburu hewan serta membuka lahan pertanian baru, seperti menanam umbi-umbian.

Sampai saat ini suku Sakai masih meyakini bahwa dukun sangat berperan dan paling berpengaruh ditengah-tengah kehidupan masyarakat suku Sakai. Permasalahan sampai saat ini pemerintah dan pemangku kepentingan di Kabupaten Bengkulu belum mampu merubah kepercayaan masyarakat Sakai untuk itu pengelolaan berbasis komunitas dapat berjalan dengan baik apabila terdapat peran pemangku kepentingan dan modal sosial (Setyowati, R. D., & Sakuntalawati, 2020) agar tidak lagi percaya dengan dukun. Alasan ini dikarenakan adanya anggapan warga Sakai bahwa peran dukun dapat mengobati warga Sakai yang sakit, memanggil makhluk-makhluk ghoib. Menurut orang

suku Sakai pemahaman ghoib sama dengan meyakini rukun iman dalam ajaran ajaran islan yaitu Rukun ke 6 percaya kepada Qodar baik dan Qodar buruk. menurut mereka percaya kepada dukun dengan menggunakan alam ghoib adalah perbuatan yang tidak berdosa, menurut keyakinannya (keterangan tokoh agama Sakai bapak yaitm,2019).

#### **4.2. Penyajian data dan informasi masyarakat Sakai.**

Suku Sakai adalah sala satu suku asli di Kabupaten Bengkalis. Masyarakat suku Sakai pada dahulunya tinggal di hutan. Akibat dari pembangunan dan migrasinya warga pendatang dari suku lain seperti suku batak dan minang menjadikan masyarakat Sakai terpinggirkan. Masyarakat Sakai yang dulunya hidup berkelompok di dalam hutan, namun saat ini hutan telah banyak di rubah fungsinya menjadi lahan perkebunan HTI dan pembangunan pipa kilang minyak Caltex, menyebabkan warga Sakai tidak lagi memiliki lahan tempat tinggal dan lahan pertanian untuk melangsungkan kehidupan mereka.

Data dan informasi yang diperoleh bahwa warga suku Sakai yang masih hidup berkelompok pada kawasan hutan dan tepian sungai rokan, mereka belum berbaur dengan masyarakat umum, kondisinya sangat memprihatinkan. masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, rumah tempat tinggal yang tidak layak di huni menjadi prioritas utama yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah. Sampai saat ini warga Sakai yang berada pada kawasan hutan dan tepian sungai belum mau berbaur dengan masyarakat umum, sehingga mereka disebut sebagai masyarakat keterbelakangan dan terimpit dalam jurang kemiskinan. Lain halnya dengan warga Sakai yang telah berbaur dengan masyarakat umum, seperti di kota duri mandau bahwa orang-orang Sakai telah maju dan telah memiliki kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu perlunya kebijakan pembangunan berkelanjutan dan modal sosial yang menggambarkan segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, serta didalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi, serta sosial inheren dalam struktur relasi sosial dan jaringan sosial di dalam suatu masyarakat yang menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling percaya, membawa saluran informasi, dan menetapkan norma-norma, serta sangsi-sangsi sosial bagi para anggota masyarakat tersebut (Cahyono, B., & Adhiatma, 2020) secara masif dan progresif untuk warga Sakai yang masih bertahan hidup di kawasan hutan HTI dan hutan adat serta tepian sungai Rokan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

#### **4.3. Memperkuat kemitraan Pemerintah, Perusahaan Swasta dan Masyarakat.**

Pemerintah sebagai pelaku kebijakan di Negeri ini dan Tentunya kebijakan yang dihasilkan menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan terciptanya kesejahteraan masyarakat. modal sosial sebagai basis struktur dalam menggerakkan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi aktif dalam aktivitas pembangunan. Modal sosial menekankan pentingnya kebersamaan masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup bersama dan melakukan perubahan yang lebih baik serta penyesuaian secara terus menerus (Rahman, A., Nurlela, N., & Rifal, 2020)

Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah banyak membangun fasilitas-fasilitas untuk warga Sakai, seperti pembangunan rumah tempat tinggal, bantuan perikanan bahkan penyediaan lahan pertanian dan perkebunan untuk kelompok-kelompok warga suku Sakai. Namun kenyataan di lapangan sampai saat ini masih ada warga Sakai yang belum mau menempati rumah tempat tinggal bantuan Pemerintah. *Pertanyaanya Mengapa warga Sakai enggan dan tidak mau tinggal pada lahan perumahan yang telah disediakan Pemerintah?* Jawabannya adalah warga Sakai lebih nyaman tinggal pada habitat aslinya yaitu di pinggiran sungai atau di dalam hutan sebagai peradaban asli dari kehidupan mereka. Menurut pandangan warga suku Sakai, bahwa lahan dan perumahan yang disediakan pemerintah untuk mereka tempati jauh dari aktivitas perekonomiannya (jauh dari sungai), sementara warga suku Sakai sudah terbiasa tinggal di tepian sungai untuk mencari tangkapan ikan. Oleh Karena itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis seharusnya membangun rumah tempat tinggal suku Sakai berdekatan dengan aktivitas-aktivitas mereka sehari-hari yaitu menangkap ikan atau berburu hewan di hutan. (*wawancara dengan warga suku Sakai di tepian sungai Rokan Desa Petani Kecamatan Bathin salopan,2019*).

*Trio Saputra, Aguswan, Syofian, Harapan Tua F.S*

*Model Penguatan Modal Sosial Pembangunan Budaya Dan Kearifan Lokal Suku Sakai Kabupaten Bengkalis*



Pada kenyataan lain yang dialami warga suku Sakai di Desa petani adalah bahwa rumah tempat tinggal yang ditempati oleh warga suku Sakai saat ini sebanyak 100 KK tepatnya di pinggiran sungai rokan adalah lahan milik PT. Caltex/ Cevron. Status kepemilikan yang diberikan PT. Chevront adalah hak pakai. PT.Chevron memberikan ijin tinggal dikawasan itu dan tidak boleh membangun permanen pada kawasan tersebut. Dengan demikian warga suku Sakai yang bertempat tinggal ditepian sungai rokan statusnya menumpang pada areal Perusahaan. Begitu juga dengan warga Sakai yang tinggal di pedalaman Hutan Tanaman Industri milik PT.Arara Abadi, tepatnya di Desa Koto Pait Beringin Tualang Mandau ada sebanyak 27 KK suku Sakai. status lahan rumah tempat tinggal yang mereka bangun seadanya adalah hak pakai dan pihak perusahaan PT. Arara abadi melarang warga untuk membangun rumah permanen dikawasan HTI tersebut.

Menurut Keterangan dari Kepala Desa Koto Pait Beringin (Firdaus) menjelaskan bahwa memang ada sekelompok orang suku Sakai yang menetap pada areal HTI PT Arara abadi, ia menyebutkan warga Sakai bertahan tinggal di lahan tersebut, karena mereka masih menganggap lahan itu adalah milik mereka dari dahulunya. Sementara pihak PT arara abadi telah menguasai lahan tersebut untuk kegiatan Tanaman Industri. Oleh karena itu hal di atas sering terjadi konflik atau pertikaian antara warga suku Sakai dengan pihak perusahaan.dan bahkan sampai penyelesaiannya ke pengadilan, dan kemenangan atau putusan pengadilan selalu berpihak kepada Perusahaan yang secara legal lahan telah mendapatkan izin dari Pemerintah untuk membuka kawasan Hutan Tanaman Industri di wilayah tersebut.

Uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa warga Sakai saat ini bertempat tinggal , baik di pinggiran sungai rokan maupun di areal/ kawasan Hutan Tanaman Industri, status tempat tinggal mereka adalah hak pakai (sementara) yang diberikan ijin oleh PT.Cevron maupun PT.Arara Abadi. Untuk menyikapi permasalahan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pelaku usaha dan masyarakat perlu membangun kemitraan dan membuat langkah-langkah yang tepat dalam membangun dan memberdayakan warga suku Sakai Kabupaten Bengkalis dengan adanya modal sosial modal sosial yang menekankan pada jaringan hubungan sosial dan menekankan pada karakteristik yang melekat pada diri individu yang terlibat dalam interaksi sosial. Modal sosial sangat diperlukan oleh masyarakat agar terjaga kelangsugnan hidupnya dalam menghadapi gelombang yang dasyat dalam era teknologi informasi (Ancok, 2003). modal sosial yang potensial untuk dikembangkan ditengah krisis menjadi penting karena ternyata modal sosial bukan saja dapat mendukung proses pembangunan yang sedang berjalan, tapi juga dapat melemahkan proses pembangunan itu sendiri (Syofian, S., Sujianto, S., & Handoko, 2020). Oleh sebab itu ada beberapa hal penting yang perlu dilakukan yaitu :

- a. *Pemangku kepentingan merumuskan bersama tentang isu, masalah dan solusi untuk perbaikan kehidupan warga suku Sakai.* Hal ini perlu dilakukan untuk mendapat masukan dan luaran prioritas - prioritas pembangunan dan pemberdayaan yang menjadi kebutuhan bagi warga suku Sakai.
- b. *Pemerintah harus melakukan kebijakan dalam bentuk pembebasan lahan untuk warga suku Sakai.* Hal ini diperlukan agar lahan perumahan ataupun lahan pertanian yang ditempati oleh warga Sakai saat ini, menjadi milik mereka. Artinya pemerintah harus memberikan sebagian lahan yang dikuasai Negara dan diberikan hak penuh kepada masyarakat suku Sakai utuk memiliki lahan rumah tempat tinggal dan lahan perkebunan dengan status hak milik.
- c. *Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus memfasitasi dan membuat kesepakatan bersama dengan pelaku usaha untuk menyepakati penyerahan lahan yang di kuasai Negara dan swasta dan diberikan kepada warga suku Sakai agar mereka memiliki lahan pertanian maupun tempat tinggal.* Lahan yang dimaksud adalah lahan dimana saat ini warga suku Sakai menetap pada kawasan lahan HTI maupun pada kawasan sungai Rokan Kabupaten Bengkalis.
- d. *Pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat suku Sakai dapat dilakukan dengan dukungan APBD Kabupaten,APBDdes, Dana Desa (DD) dan bantuan pelaku usaha melalui program *Coorporate sosial responsibility (CSR)*.*

Pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat suku Sakai pada dasarnya adanya kemauan dan keinginan dari semua pihak untuk melibatkan diri dan menyediakan sumber-sumber

*Trio Saputra, Aguswan1, Syofian, Harapan Tua F.S*  
*Model Penguatan Modal Sosial Pembangunan Budaya Dan Kearifan Lokal Suku Sakai Kabupaten Bengkalis*

daya yang dibutuhkan oleh mereka. Adnya modal sosial yang bersinergi dengan *local wisdom* bisa menjadi solusi agar kecemasan dan keretakan sosial tidak terjadi. Modal sosial itu berupa rasa percaya, toleransi, saling mengingatkan saling memaanusiakan, saling menghormati, kejujuran, bertanggung jawab, memegang komitmen, dan sebagainya (Mutiara, I. A., Nur, S., Ramlan, H., & Basra, 2020). Untuk itu Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus mencakup semua strata sosial (Wirutomo, 2012). Pemberdayaan harus bersifat "*community based empowerment*" (CBE), sebab pada dasarnya masyarakat beraktifitas dalam berbagai ikatan komunitas seperti kedekatan tempat tinggal, persamaan profesi, agama, suku, hobi ataupun ketertarikan yang masing-masing tumbuh dengan karakteristik berbeda-beda (Wirutomo, 2012)).

Dengan kata lain, kebijakan yang dihasilkan harus mengakomodasi modal sosial yang dimiliki oleh sebuah komunitas. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan pemerintah mampu mengidentifikasi potensi dalam setia jenis komunitas serta mau bermitra dengan semua kekuatan komunitas (Fathy, 2019). Kata kuncinya adalah kolaborasi antara stakeholder sehingga apa yang mereka inginkan dibuat perencanaan berdasarkan kebutuhan. Itulah konsep pembangunan keberlanjutan yang diinginkan untuk masyarakat terpinggirkan (Laura, N., Sari, R., Setiawan, I., & Herdiyanti, 2018) Adanya Kerjasama tersebut diwarnai oleh suatu pola interrelasi yang timbal balik dan saling menguntungkan serta dibangun diatas kepepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat. Kekutan tersebut akan maksimal jika didukung oleh semangat proaktif membuat jalinan hubungan diatas prinsip-prinsip sikap yang partisipatif, saling memberi dan menerima, saling percaya dan diperkuat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang mendukungnya.

## 5. Kesimpulan

Inventarisasi keberadaan suku Sakai di Kabupaten Bengkalis memberikan gambaran bahwa masyarakat Sakai belum terdata dengan baik oleh pemerintah daerah. Masyarakat Suku Sakai masih ada yang bertahan hidup pada daerah kawasan hutan dan pinggiran sungai karena kebiasaan bergantung dengan alam, dengan kondisi hidup dibawah garis kemiskinan dan kebodohan. Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan pemerintah desa perlu melakukan peran dan tanggung jawabnya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat Suku Sakai, penyediaan lahan pertanian dan perkebunan untuk warga Sakai dan pembangunan rumah layak huni.

Pemerintah Daerah dan perusahaan sawsta (PT Chevron dan HTI PT.Arara abadi) telah memahami kehidupan orang suku Sakai di wilayah kerjanya, dan sepatutnya Perusahaan-perusahaan tersebut dapat memberikan/menyerahkan sebagian lahan milik mereka kepada warga Sakai dengan status hak milik. Dan warga Sakai memiliki kekuatan atas untuk merubah kehidupan yang lebih baik. Pemerintah harus memfasitasi penyelesaian masyarakat suku Sakai tersebut dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan untuk warga suku Sakai.

Rumusan Model penguatan modal sosial pembangunan budaya dan kearifan lokal merupakan konsep jaringan sosial yang dapat mengintegrasikan peran antar pelaku kepentingan di dalam memperkuat pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat terpececil, seperti yang terjadi pada masyarakat suku Sakai Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

## 6. Saran

Saran kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dan perusahaan yang ada di area pemungkiman Kabupaten Bengkalis untuk melakukan kegiatan yaitu :

- a. Pendataan kependudukan warga Sakai dengan mempermudah warga Sakai untuk mendapatkan identitas kependudukan secara pasti
- b. Penyediaan lahan pertanian dan perkebunan serta pembukaan lahan baru yang di kuasai Negara untuk diserahkan kepada suku Sakai bengkalis
- c. Pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat Sakai dengan status kepemilikan lahan perumahan yang legal atas kepemilikan mereka sendiri,

*Trio Saputra, Aguswan, Syofian, Harapan Tua F.S*

*Model Penguatan Modal Sosial Pembangunan Budaya Dan Kearifan Lokal Suku Sakai Kabupaten Bengkalis*

- d. Pembangunan sarana pendidikan dasar untuk anak-anak Sakai pada wilayah yang mereka tempati, karena anak-anak Suku Sakai tidak mengecap pendidikan,
- e. Penyediaan tenaga medis dan medis untuk pendampingan kesehatan masyarakat
- f. Penguatan kelembagaan adat dan budaya Sakai.

**Ucapan terimakasih:** Terima kasih kepada Universitas Lancang Kuning, ISI Padang Padang Panjang dan Universitas Riau yang telah melakukan penelitian bersama dan memberikan bantuan dana penelitian serta kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis atas kerjasama dalam penelitian ini.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, S. (2016). Potensi dan kekuatan modal sosial dalam suatu komunitas. *SOCIUS: Jurnal Sosiologi*, 12(1), 15–21.
- Ancok, D. (2003). Modal sosial dan kualitas masyarakat. *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 8(15), 4–14.
- Asril, A., Jamarun, N., Hamzah, H., Halilintar, M., & Saputra, T. (2020). Tari Poang dan Tari Olang-olang Pertunjukan Ritual Masyarakat Sakai di Kabupaten Bengkalis, Riau. *Jurnal Seni Budaya Mudra*, 35(2), 154–163.
- Asy'ari, H. (2009). *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai modal sosial pada PT NEWMONT*. (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Cahyono, B., & Adhiatma, A. (2020). Peran modal sosial dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat petani tembakau di Kabupaten Wonosobo. *In Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM)*, 131–144.
- Fathy, R. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1–17.
- Hidayat, Z. (2011). Penyelesaian sengketa lahan (HPHTI) antara PT. Arara Abadi dengan suku Sakai di desa beringin kecamatan pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. *Fakultas Hukum*, 6(1).
- Irmawan, I. (2018). Pemberdayaan Suku Kaili Da'a Di Kabupaten Sigi. *Sosio Konsepsia*, 7(2), 91–100.
- Kurtubi, D. A. (2017). *Mengenal Suku-Suku Asli (Komunitas Adat terpencil) di Provinsi Riau*. Dinas Sosial Provinsi Riau.
- Laura, N., Sari, R., Setiawan, I., & Herdiyanti, H. (2018). Peran Modal Sosial Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Alam Sebagai Strategi Bertahan Hidup di Dusun Limang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. *Society*, 6(2), 74–82.
- Meilani, N. L., Wicaksono, B., Lilestina, S., & Subeqi, A. T. (2019). Strategi Penguatan Modal Sosial Dalam Pelaksanaan Program Kampung Kb Di Kabupaten Pelalawan Dan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 12(1), 9–18.
- Mutiara, I. A., Nur, S., Ramlan, H., & Basra, M. H. (2020). Modal Sosial: Membangun Optimisme Sosial pada Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19. *Prosiding Nasional Covid-19*, 113–116.
- Ningsih, D., & Jalil, A. (2017). *Perubahan Sosial Budaya Suku Sakai Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak*. (Doctoral dissertation, Riau University).
- Pontoh, O. (2010). Identifikasi dan analisis modal sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan desa Gangga Dua Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Perikanan Dan Kelautan Tropis*, 6(3), 125–133.
- Pranadji, T. (2016). Penguatan Modal Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan Agroekosistem Lahan Kering (Studi Kasus di Desa-desa (Hulu DAS) Ex Proyek Bangun Desa, Kabupaten Gunungkidul dan Ex Proyek Pertanian Lahan Kering, Kabupaten Boyolali). *Jurnal Agro Ekonomi*, 24(2), 178–206.
- Putnam, R. (1993). The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. *The American Prospect*, 13, 35–42.
- Rahman, A., Nurlela, N., & Rifal, R. (2020). Pengarusutamaan Modal Sosial Dalam Pembangunan Perdesaan. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(1), 1–23.
- Setyowati, R. D., & Sakuntalawati, L. R. D. (2020). Hubungan Antara Peran Dan Modal Sosial Pemangku Kepentingan Dengan Pengelolaan Pariwisata Berbasis Komunitas Pada Agrowisata Argoayuningtani Di Dukuh Pasah Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. *Journal of Development and Social Change*, 3(2), 62–73.
- Suparlan, P. (1995). *Orang Sakai di Riau: masyarakat terasing dalam masyarakat Indonesia: kajian mengenai perubahan dan kelestarian kebudayaan Sakai dalam proses transformasi mereka ke dalam masyarakat Indonesia melalui Proyek Pemulihan Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Tera* (Departemen). Yayasan Obor Indonesia.

*Trio Saputra, Aguswan1, Syofian, Harapan Tua F.S*

*Model Penguatan Modal Sosial Pembangunan Budaya Dan Kearifan Lokal Suku Sakai Kabupaten Bengkalis*

- Syofian, S., Sujianto, S., & Handoko, T. (2020). Modal Sosial Kelembagaan Petani Karet di Kabupaten Kuantan Singingi. *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, 5(1), 52–59.
- Tan, A. N. (2020). Strategi Penguatan Modal Sosial dalam Pelaksanaan Program CSR– Serba Unsur Lele.
- Tumanggor, R. (2017). Pemberdayaan kearifan lokal memacu kesetaraan komunitas adat terpencil. *Sosio Konsepsia*, 12(1), 1–17.
- Wirutomo, P. (2012). *Sosiologi Untuk Jakarta: Menuju Pembangunan Sosial Budaya*. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta.



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license ( <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/> ).  
Published under licence by Sosio Konsepsia.